

**MOTIVASI INDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI REGIONAL
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) TAHUN 2019**

Oleh: Ika Annisa Putriani

ikaannisaptrn.98@gmail.com

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel

Bibliografi: 11 Buku, 27 Jurnal, 24 Publikasi, 55 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax: 07561-63277

Abstract

This research aims to explain India's decision to pull out from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP is a regional free trade agreement consisted of 16 members included ASEAN members, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Russia, and India which is expected to be world's biggest trading bloc. India involved in the RCEP negotiation in 2012 under the administration of Prime Minister Manmohan Singh but when Narendra Modi took over from Singh in 2014, India decided to withdraw from RCEP. This move has contradicted India's Act East foreign policy to engage Asia-Pacific countries, which India could have benefitted from the participation in the RCEP.

This research applies the economic nationalism perspective to analyze India's decision to pull out from RCEP. According to this approach, some nationalists consider the safeguarding of national economic interests as the minimum essential to the security and survival of the state. This qualitative research uses explanative methods. The data was collected through document analysis or analysing the secondary data, such as book, journal, official publication, report and websites.

This research finds that the decision to withdraw from RCEP has been driven from India's domestic politics. Modi's political party, Bharatiya Janata Party, and Modi viewed RCEP doesn't reflect both India's national and economic interest. There is also the concern that RCEP would threaten India's domestic industries, especially the dairy and steel sectors which are very important in India.

Keywords: India, Regional Comprehensive Economic Partnership, national interest, economic nationalism, and Modinomics.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan kajian ekonomi politik internasional yang melihat kerja sama ekonomi multilateral. Studi kasus yang diambil adalah negara India yang pada bulan November 2019 lalu memutuskan untuk mengundurkan diri dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* atau RCEP. RCEP adalah rencana kerja sama multilateral ASEAN dengan enam negara mitra perdagangan ASEAN untuk merespon dinamika ekonomi di kawasan dan global melalui perdagangan bebas (*free trade agreement*) di 16 negara.¹

Sistem ekonomi India mengalami perubahan dari sistem tertutup, yang dimulai setelah India mendapatkan kemerdekaannya, menjadi sistem ekonomi terbuka. Pada saat kepemimpinan PM Nashimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Singh di tahun 1991, India mulai menerapkan liberalisasi ekonomi. Perubahan paradigma pada pasar dan bisnis ini membuat India menjadi kekuatan dunia.²

Sektor perekonomian India yang dinilai penting terbagi menjadi tiga. Sektor pertama adalah sektor agrikultur atau pertanian. Produksi industri olahan susu di India merupakan yang terbesar di dunia, dengan menyumbang sekitar 19% dari pasar global sekaligus menjadikan India sebagai salah satu

produsen susu dan produk olahan susu terbesar di dunia.³ Sektor kedua adalah sektor industri (sektor sekunder) yang meliputi pertambangan dan penggalian, manufaktur, gas, listrik, konstruksi, dan pasokan air. Pada tahun 2018-2019, sektor ini menyumbang sekitar 29,6% pada PDB India. Maka dengan itu, sektor ini telah menjadi kontributor utama dalam menghasilkan manufaktur di India.⁴ Sektor yang terakhir yaitu sektor jasa, yang mana meliputi keuangan, perumahan, administrasi publik, dan jasa lainnya seperti perdagangan, perhotelan, transportasi, dan komunikasi. Saat ini, sektor tersebut menjadi sektor yang sangat membantu ekonomi India dan menyumbang sekitar 54,3% pada PDB India di tahun 2018-2019.⁵

Kebijakan luar negeri India juga mengalami perubahan yang pada awalnya, India adalah negara yang tidak memihak blok Barat atau Timur namun strategi politik luar negeri tersebut tidak berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan India dan terjebak dalam krisis keuangan pada awal 1990.⁶ Pertimbangan ini

³ Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority of India, "Dairy Products." Diakses pada 21 Juni 2020, http://apeda.gov.in/apedawebsite/SubHead_Products/Dairy_Products.htm

⁴ India Brand Equity Foundation, "Iron and Steel Industry in India." Diakses pada 21 Juni 2020 <https://www.ibef.org/industry/steel.aspx>

⁵ Hemant Singh "What is the Sector-wise contribution of GDP in India?" Diakses pada 05 Juni 2020

<https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-is-the-sectorwise-contribution-in-gdp-of-india-1519797705-1>

⁶ Rajesh Basrur, "Modi's Foreign Policy Fundamentals: A Trajectory Unchanged," *International Affairs* Vol. 93 No. 1 (2017): 13

¹ Ragimun, "Kerja Sama Perdagangan Barang pada Forum RCEP bagi Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 09 No. 1 (Juni 2018), 67

² Abdurahim Okhunov Abduraxmonovich, "Economic Cooperation between India and Central Asian Republics with Special Reference to Uzbekistan." *RIS Discussion Papers*, No. 53 (June 2003), 8-9.

menyebabkan India mengubah prinsip atau pola non blok India menjadi sebuah strategi yang disebut dengan kemitraan strategis yang disebut dengan *Look East*.⁷ Kebijakan *Look East* adalah kebijakan yang diterapkan India pada tahun 1992 oleh Perdana Menteri (PM) saat itu yaitu Narasimha Rao yang dibuat untuk menyatukan ekonomi sekaligus partisipasi politik di Asia Tenggara serta mendorong investasi asing (*foreign direct investment*) dan meningkatnya keterlibatan India dengan ASEAN.⁸

Pada tahun 2014, Narendra Modi dari *Bharatiya Janata Party* (BJP) terpilih menjadi Perdana Menteri India. Visi Modi adalah ingin India menjadi mandiri secara ekonomi dan menerapkan sistem ekonomi proteksionis untuk melindungi kepentingan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ekonominya ini menciptakan slogan “*Make in India*” yang menekankan perlunya promosi, membina, mendukung pemilik dan pedagang usaha kecil yang selalu menjadi pendukung inti BJP.⁹ Kebijakan luar negeri *Look East* ataupun UPA yang telah diterapkan sebelumnya, Modi perkuat kembali dengan kebijakan baru yang disebut *Act East*.

⁷ Vikash Chandra, “Modi Government and Changing Patterns in Indian Foreign Policy,” *Jadavpur Journal of International Relations* Vol. 21 No. 2 (2017): 103

⁸ Ian Hall, “Multialignment and India Foreign Policy Under Narendra Modi,” *The Commonwealth Journal of International Affairs* Vol. 105 No. 3 (2016): 273

⁹ Swaminathan S. Anklesaria Aiyar, “India’s New Protectionism Threatens Gains from Economic Reform,” diakses pada 28 Agustus 2020

<https://www.cato.org/publications/policy-analysis/indias-new-protectionism-threatens-gains-economic-reform>

Kerja sama India dan ASEAN dilanjutkan dengan rencana membentuk suatu rencana kerja sama multilateral/regional yaitu *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP adalah salah satu kerja sama yang dibentuk oleh negara anggota ASEAN dan enam negara mitra kerja sama ASEAN (ASEAN +6) yaitu Australia, Selandia Baru, India, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia. RCEP digagas untuk memperluas integrasi regional dan perdagangan bebas ASEAN dengan enam mitra dagang dan investasi secara komprehensif, untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari timpang tindh perjanjian perdagangan bilateral dan regional antar ASEAN dengan kawasan Asia-Pasifik, untuk memberikan keuntungan yang nyata bagi negara-negara anggota dengan peningkatan akses pasar, fasilitasi perdagangan yang lebih koheren dan menggagas aturan-aturan dan kerja sama yang mewujudkan interaksi ekonomi yang saling menguntungkan.¹⁰

Perundingan RCEP telah berjalan selama lebih dari 7 tahun dan telah melaksanakan 28 putaran perundingan reguler, 13 pertemuan tingkat menteri dan 3 kali pertemuan KTT. Pada tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2019 lalu, ASEAN mengadakan KTT ASEAN ke-35 dan KTT RCEP ke-3 di Bangkok, Thailand.¹¹ Pada 4

¹⁰ Dewan Perwakilan Rakyat RI, “Kerja Sama Perdagangan Barang pada Forum RCEP bagi Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI*. Vol. 09 No.1 (Juni 2019), 68.

¹¹ Bernama, “35th ASEAN Summit Begins,” diakses pada 03 Januari 2020, <https://www.nst.com.my/news/nation/2019/1/535373/35th-asean-summit-begins>.

November 2019 lalu, ASEAN dan enam negara mitra yang hadir telah menyelesaikan negosiasi berbasis teks sebanyak 20 bab mengenai RCEP yang akan dimulai penandatanganan pada tahun 2020. Namun, hanya satu negara yang tidak menyepakati yaitu India¹² karena kerja sama tersebut tidak sesuai dengan kepentingan India dan ingin melindungi sektor ekonominya dan untuk menghindari beberapa pasar masuk ke dalam India.¹³

Dari penjelasan di atas, maka diangkatlah sebuah rumusan masalah: **“Mengapa Perdana Menteri Modi memilih untuk mengundurkan diri dari *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Tahun 2019?”**

KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan adalah Modinomics dan populisme Modi. Modinomics merupakan sebuah program yang dijalankan pada awal Modi menjadi perdana menteri di India tahun 2014. Modinomics diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang diharapkan untuk memastikan bahwa India kembali ke lintasan pertumbuhan ekonomi tinggi yang sempat India dapatkan pada tahun 2000an.¹⁴ Unsur utama dalam modinomics adalah mendapatkan kepercayaan rakyat kembali kepada

pemerintah yang mengakibatkan Modi menggunakan strategi populisme sebagai strategi politiknya.¹⁵ Dalam strategi *hindutva* yang dibentuk oleh PM Modi dan BJP, terjalin erat antara logika populis dan nasionalis untuk melawan partai sebelumnya yaitu Partai Kongres yang memiliki kinerja buruk dan lemah, terutama pada pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingginya pengangguran, dan inflasi.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership*

Pada tahun 2001, *East Asia Vision Group* (EAVG) merekomendasikan pembentukan EAFTA (*East Asia Free Trade Agreement*) kepada pemimpin ASEAN+3. Isu ini diungkit pada tahun 2004 pada saat pertemuan ASEAN+3 *Economic Ministerial*.¹⁷

Jepang mengusulkan sebuah pendekatan alternatif yaitu CEPEA (*Comprehensive Economic Partnership of East Asia*) yang berdasarkan kerangka *East Asia Summit* (EAS) yang dibentuk pada tahun 2006. Pada Agustus 2011, pertemuan EAS *Economic Ministerial* menyambut gabungan kerja sama China dan Jepang dalam *“Initiative on Speeding up the Establishment of EAFTA and CEPEA.”* Diakhir diskusi pada November 2011, ASEAN

¹² “RCEP Joint Leaders Statement for 3rd RCEP Summit,” ASEAN (2019), diakses pada 22 Desember 2019, <https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-Summit.pdf>

¹³ Rahul Mishra, “Why India Pulled Out of RCEP Free Trade Deal,” diakses pada 03 September 2020, <https://www.dw.com/en/why-india-pulled-out-of-the-rcep-free-trade-deal/a-51137128>.

¹⁴ Shalendra D. Sharma, “Modinomics in India” *Asian Survey*, Vol. 59, Number 3 (2019): 549

¹⁵ Jha, R. “Modinomics, Design, Implementation, and Prospects”, *Asian Economic Policy Review* (2018): 1-2

¹⁶ Ibid. 405-407

¹⁷ Sanchita Basu Das and Reema B. Jagtiani “The Regional Comprehensive Economic Partnership: New Paradigm or Old Wine in a New Bottle.” *ISEAS Economic Working Paper No. 2014-3* (November 2014), 4-5

mengusulkan model FTA berbasis regional dengan ASEAN sebagai pusatnya, yaitu RCEP.¹⁸

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah sebuah rencana kerja sama dengan negara anggota ASEAN dan enam negara mitranya, yaitu Australia, Selandia Baru, China, India, Korea Selatan, dan Jepang (ASEAN +6).¹⁹ RCEP pertama kali didiskusikan pada saat KTT ASEAN ke-19 di Bali, Indonesia pada tanggal 17-19 November 2011, dimana pemimpin dari 10 Negara anggota ASEAN menyetujui untuk menguatkan hubungan ASEAN dengan negara mitranya melalui perdagangan bebas.²⁰

RCEP menyerahkan dua dokumen penting yaitu *ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership* yang menjelaskan prinsip dari kesepakatan kerja sama tersebut dan *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership* yang diperkenalkan oleh 16 negara RCEP pada Agustus 2012. Negosiasi RCEP pertama kali dimulai negosiasinya pada saat KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja pada November 2012²¹ dan

disetujui pada tanggal 15 November 2020²²

RCEP dibentuk untuk menyebarkan dan menguatkan hubungan antar negara serta meningkatkan partisipasi negara dalam pembangunan ekonomi di kawasannya. Selain untuk menciptakan ekonomi yang maju, ASEAN menciptakan RCEP karena minat ASEAN terhadap sentralitas kawasan. RCEP menawarkan pendekatan keanggotaan yang jauh lebih terfokus secara regional dan secara resmi mendukung sentralitas ASEAN (*ASEAN Centrality*) yang mana sekaligus menjadi prinsip RCEP.²³

Nasionalisme Ekonomi India

India telah mengubah sistem ekonominya menjadi liberalisme pada tahun 1992. Pemerintahan Partai Kongres di bawah perdana menteri Narasimha Rao memprakarsai percepatan liberalisasi ekonomi pada tahun 1991. BJP mulai mengembangkan program ekonominya sendiri yang lebih koheren sebagai respon. Hasil pertama dari upaya ini adalah Pernyataan Kebijakan Ekonomi yang berjumlah 54 halaman pada tahun 1992 yang dilanjutkan dengan proposal ekonomi partai dituangkan dalam manifesto pemilu tahun 1996 dan 1998.²⁴ Titik awal pemikiran

¹⁸ *Ibid.* 5-6

¹⁹ Sanchita Basu Das, "Asia's Regional Comprehensive Economic Partnership," diakses pada 14 Agustus 2020, <https://www.eastasiaforum.org/2012/08/27/asias-regional-comprehensive-economic-partnership/>

²⁰ Bilaterals.org, "India and Regional Comprehensive Economic Partnership: Key Issues and Implications," diakses pada 28 Juni 2020, <https://www.bilaterals.org/?india-and-regional-comprehensive>

²¹ ASEAN, "Regional Comprehensive Economic Partnership," diakses pada 28 Juni 2020, https://asean.org/?static_post=rcep-

[regional-comprehensive-economic-partnership](#)

²² ASEAN. "Joint Leaders' Statement on The Regional Comprehensive Economic Partnership." Diakses pada 16 November 2020, <https://asean.org/joint-leaders-statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/>

²³ ASEAN Framework for RCEP.

²⁴ Baldev Raj Nayar, "Limit of Economic Nationalism in India," *Asian Survey* Vol. 40 No. 5 (September 2000): 798

BJP tentang kebijakan ekonomi adalah bahwa solusi untuk masalah ekonomi negara tidak terletak pada model luar negeri melainkan di dalam negara itu sendiri maka dengan itu BJP menolak komunisme dan kapitalisme serta secara jelas memilih *swadeshi* yang disamakan dengan "nasionalisme ekonomi". *Swadeshi* secara literal adalah domestik atau dalam negeri atau miliki negara sendiri. Istilah *swadeshi* dipopulerkan pada tahun awal perjuangan kemerdekaan oleh Mahatma Gandhi. Hal ini kemudian digunakan oleh hindu nasionalis sebagai filosofi panduan. *Swadeshi* saat ini identik dengan globalisasi dan dipandang sebagai sarana untuk memproyeksikan kekuatan India.²⁵ Bagi BJP, *swadeshi* diartikan sebagai *India First* yang mana konsep ini diartikan BJP sebagai sumber daya dalam negeri memiliki cakupan penuh untuk pengembangan kepentingan nasional dan manfaatnya harus mengalir ke masyarakat.²⁶

Pengunduran Diri India dari RCEP

KTT RCEP ke-3 pada 4 November 2019 lalu yang melibatkan negara anggota ASEAN dan enam negara mitra yang hadir, telah menyelesaikan negosiasi berbasis teks untuk 20 bab untuk memulai penandatanganan pada tahun 2020. Namun, hanya satu negara yang tidak menyepakati yaitu

India.²⁷ PM Narendra Modi menyampaikan sebuah pengumuman selama pidatonya pada KTT RCEP. Ia mengatakan bahwa bentuk kerja sama RCEP tidak sepenuhnya mencerminkan dasar dan prinsip RCEP yang telah disepakati. Kerja sama ini, bagi India, tidak menangani masalah dan kekhawatirannya maka dengan itu, India tidak mungkin bergabung dalam kerja sama RCEP.²⁸ Ketika ia mengukur perjanjian RCEP dengan kepentingan masyarakat India, ia tidak mendapatkan jawaban yang positif.

Dalam *media briefing* yang disampaikan oleh Sekretaris Menteri Luar Negeri India, Vijay Thakur Singh, ia mengatakan bahwa India telah menyampaikan keputusan di pertemuan tersebut untuk tidak bergabung dengan kerja sama RCEP. India memiliki masalah pada kepentingan utama yang belum terselesaikan. Perdana Menteri Narendra Modi menyoroti bahwa ia dipandu oleh dampaknya terhadap kehidupan masyarakat India, terutama masyarakat yang kurang mampu.²⁹

Upaya sudah dilakukan untuk India kembali dalam perundingan dengan menawarkan skema khusus kepada India pada Agustus 2020 lalu. Skema khusus yang ditawarkan

²⁵ David P. Arulanantham "The paradox of the BJP's stance towards external economic liberalisation: why a Hindu nationalist party furthered globalisation in India," *Asia Programme Royal Institute of International Affairs*, (2014): 5-6

²⁶ Baldev Raj Nayar, *Op.Cit*, 799

²⁷ "RCEP Joint Leaders Statement for 3rd RCEP Summit," ASEAN (2019), diakses pada 22 Desember 2019, <https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-Summit.pdf>

²⁸ Manash Buyan, "India will not join RCEP trade, my conscience won't allow it, says PM Modi." Diakses pada 03 September 2020, <https://theprint.in/diplomacy/india-will-not-join-rcep-deal-my-conscience-wont-allow-says-pm-modi/315636/>

²⁹ Transcript of Media Briefing by Secretary (East) during PM's visit to Thailand (November 04, 2019)

mengakui pilihan India untuk menggunakan tariff *most favoured nation* yang lebih tinggi daripada tariff dasar pada tahun 2014 dan menanggukkan komitmennya terkait pembukaan pasar India. India merespon skema ini dengan jelas bahwa India tidak bisa terburu-buru mempertimbangkan kembali untuk terlibat dalam RCEP.³⁰

Pada saat KTT RCEP ke-4 tanggal 15 November 2020, RCEP ditandatangani oleh semua negara anggota RCEP kecuali India. RCEP menerbitkan sebuah deklarasi yang disebut dengan *Ministers' Declaration on India's Participation in the Regional Comprehensive Economic Partnership*. Dalam publikasi tersebut disebutkan bahwa India sebagai salah satu negara inisiator RCEP dan telah mengikuti negosiasi sejak tahun 2012, RCEP akan tetap menerima India apabila India sudah siap untuk bergabung yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 20.9 dalam perjanjian RCEP.

Alasan India Mengundurkan Diri dari RCEP

Kekhawatiran India terhadap Barang Impor China

Berdasarkan *Department of Commerce* India, China termasuk negara mitra perdagangan India terbesar termasuk juga Amerika Serikat, Hongkong, dan Uni Emirat Arab. Pada tahun 2015-2018, China merupakan negara mitra India terbesar sekaligus mitra impor India di posisi pertama sedangkan tahun 2019 dan 2020 di posisi kedua.

Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan bilateral India dan China memiliki defisit perdagangan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan negara mitra perdagangan India lainnya.

India sendiri sudah memiliki pandangan negatif terhadap barang impor dari China. Naresh Gujral, Ketua Komite Perdagangan India memberi laporan mengenai dampak barang impor China terhadap industri India pada 26 Juli 2018.³¹ Dalam laporan komite tersebut dikatakan bahwa meningkatnya impor dari China memberikan dampak bagi sejumlah industri padat karya yang secara tradisional telah menjadi salah satu mata pencaharian dengan tenaga kerja terbesar di India. Sektor manufaktur dalam negeri India dapat mensubstitusi sebanyak 25% dari total impor dari China. Dalam industri obat-obatan, dampak yang dihasilkan sangat besar dikarenakan adanya ketergantungan pada impor China sebanyak 90% pada industri tersebut. Impor panel surya dari China mendominasi pasar India sebesar 90%. Harga *dumping* di India lebih rendah daripada harga yang mereka jual di Jepang, Eropa atau AS. Dalam bidang tekstil laporan tersebut mencatat bahwa impor ini telah mengakibatkan penutupan 35% alat tenun listrik di Surat dan Bhivandi. Hal ini memicu serangan balik pada struktur pajak pemerintahan pusat dan negara bagian yang mengenakan pajak serat sintetis sebesar 18%, benang pada 12% dan kain sebesar 5%. Hal ini

³⁰ Amiti Sen, "India Not Ready to Take Up RCEP's 'Flexible' Offer." Diakses pada 22 Oktober 2020, <https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/india-not-ready-to-take-up-rceps-flexible-offer/article31797002.ece>

³¹ Parliament of India (Report), Impact of Chinese Goods on Indian Industry. (Rajya Sabha Secretariat: New Delhi, 2018). Diakses pada 23 September 2020, http://164.100.47.5/committee_web/ReportFile/13/97/145_2018_7_13.pdf

telah menyebabkan keuntungan yang tidak diinginkan oleh China sehingga mengakibatkan peningkatan impor kain dari China. Komite tersebut juga memandang bahwa pengurangan atau penutupan industri di India akan mempengaruhi pengumpulan pajak dan melanggar program *Make in India*.³²

Sekitar 85-90% pasar mainan dikuasai oleh produk China dan telah mempengaruhi 50% industri mainan di India. Mainan berbahan plastik memiliki racun dalam proporsi tinggi karena menggunakan bahan kimia tidak murni sehingga kualitasnya rendah dan dapat membahayakan kesehatan rumah tangga India. Oleh karena itu, barang yang dihasilkan juga akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Impor sepeda dari China mengalami peningkatan volume sebesar 58% dan nilai 47% pada bulan April hingga Oktober 2017 dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, sepeda dengan tagihan kurang mencapai 85% dari total impor sepeda dari China pada 2017-2018. Selain memengaruhi produsen sepeda, secara bertahap hal ini membunuh industri produsen suku cadang sepeda kecil yang tidak terorganisir yang menyediakan lapangan kerja bagi banyak pekerja terampil dan tidak terampil.

Kekhawatiran India terhadap Sektor Industri Baja

India merupakan produsen baja terbesar kedua setelah China dengan jumlah produksi 111,2 juta ton atau sekitar 5.9% total produksi dunia pada tahun 2019.³³

³² *Ibid.*

³³ World Steel Association, "Global crude steel output increases by 3.4% in 2019." Diakses pada 29 Desember 2020, <https://www.worldsteel.org/media->

Pertumbuhan sektor baja India disebabkan oleh tersedianya bahan mentah dalam negeri seperti bijih besi dan tenaga kerja yang upahnya rendah. Hal ini mengakibatkan sektor baja telah menjadi kontributor utama hasil manufaktur di India terutama pada industri baja India modern dengan pabrik baja mutakhir. Sektor ini selalu diupayakan untuk modernisasi berkelanjutan dan peningkatan ke tingkat efisiensi energi yang lebih tinggi.³⁴

India sendiri memiliki upaya untuk meningkatkan sektor baja dalam negeri dengan memberlakukan *National Steel Policy* pada 08 Mei 2017. Tujuan adanya kebijakan ini adalah untuk meningkatkan konsumsi baja dalam negeri dan untuk memenuhi seluruh permintaan baja dan baja otomotif kelas tinggi, baja listrik, dan baja khusus.

Impor baja di India secara bertahap menurun volumenya, yang sebelumnya menjadi 13,3 juta metrik ton tahun 2015, pada tahun 2017 menjadi 8,89 juta metrik ton, dan pada tahun 2018 impor naik 1% menjadi 8,95 juta metrik ton. Produk yang diimpor yaitu baja datar yang menyumbang 65% dari impor baja India pada 2018 - total 5,8 juta metrik ton. Baja panjang menyumbang 13% dari impor (1,1 juta metrik ton), diikuti oleh baja *stainless* sebesar 8% (737 ribu metrik ton), produk pipa dan tabung sebesar

[centre/press-releases/2020/Global-crude-steel-output-increases-by-3.4--in-2019.html](https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2020/Global-crude-steel-output-increases-by-3.4--in-2019.html)

³⁴ "Iron and Steel Industry in India," India Brand Equity Foundation (IBEF), diakses pada 23 September 2020, [https://www.ibef.org/industry/steel.aspx#:~:text=Indian%20Steel%20Industry%20Report%20\(Size,KB%20\)%20\(July%2C%202020\)&text=India%20was%20the%20world's%20second,ore%20and%20cost%2Deffective%20labour.](https://www.ibef.org/industry/steel.aspx#:~:text=Indian%20Steel%20Industry%20Report%20(Size,KB%20)%20(July%2C%202020)&text=India%20was%20the%20world's%20second,ore%20and%20cost%2Deffective%20labour.)

7% (655 ribu metrik ton), dan produk setengah jadi sebesar 7%. % (582 ribu metrik ton).³⁵

Pada ekspor baja India sendiri, India merupakan negara eksportir terbesar ke-9 pada tahun 2017. Di tahun 2018, India mengekspor 10,6 juta metrik ton baja, menurun 34% daripada tahun sebelumnya yang sebesar 15,9 juta metrik ton. Sebelumnya, pada tahun 2009 hingga 2014, India mengalami kenaikan jumlah ekspor sebesar 83% lalu menurun lagi sebesar 25 % pada tahun 2015 menjadi 7,3 juta metrik ton. Baja datar menyumbang 50 % dari ekspor baja India berdasarkan volume pada 5,3 juta metric ton pada tahun 2018, diikuti oleh baja setengah jadi sebesar 23% atau 2,5 juta metric ton, baja panjang sebesar 10 % atau 1 juta metrik ton, baja pipa dan tabung juga sebesar 10% atau 1 juta metric ton, dan baja tahan karat sebesar 8% atau 812 ribu metrik ton.³⁶

Ekspor terus menurun daripada impor ini membuat India, terutama para produsen baja, memiliki kekhawatiran terhadap industri baja dalam negeri akan lonjakan pangsa impor bebas bea dari negara-negara FTA seperti Jepang, China, dan Korea. Dibandingkan dengan produksi baja negara lainnya, biaya pembuatan baja di India lebih tinggi yaitu sekitar US\$ 40/ton. Biaya yang lebih tinggi ini disebabkan oleh infrastruktur, pajak yang meningkat, dan biaya modal yang sangat tinggi. Para produsen baja, sebelum membuka

pintu bagi perusahaan global, telah meminta pemerintah untuk memberikan intensif ekspor sebesar US\$ 40/ton kepada mereka supaya bisa membawa produsen global dan dalam negeri pada ruang yang sama. Hal ini mengakibatkan, apabila India menandatangani RCEP akan memberikan kemudahan impor bagi pasar asing, namun disaat yang sama, produsen baja dalam negeri akan mengalami penurunan penjualan.³⁷

Kekhawatiran India terhadap Sektor Produk Olahan Susu dari Australia dan Selandia Baru

India memiliki 75 juta petani olahan susu atau sekitar setengah dari semua petani olahan susu di dunia. Hal ini membuat India menempati posisi pertama produsen olahan susu terbesar di dunia dengan jumlah lebih dari 13% total produksi dunia dan berkontribusi sekitar 4% dari PDB India secara keseluruhan. India memiliki keunggulan dalam sektor ini karena biaya produksinya paling rendah di dunia.³⁸ Sektor olahan susu telah berkembang setiap tahunnya berdasarkan jumlahnya. Pada tahun 2016/2017, jumlahnya sebesar 165,4 juta ton kemudian mengalami peningkatan sebesar 6.62 % menjadi 176,35 juta ton pada tahun 2017/2018. *Food and Agriculture Organization* atau FAO melaporkan bahwa pertumbuhan olahan susu di India mengakibatkan adanya pertumbuhan produksi susu sebesar 1,41% dari 799,6 juta ton

³⁵ *Ibid.*

³⁶ "Steel Export Report: India," Global Steel Trade Monitor, diakses pada 02 Oktober 2020, <https://legacy.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-India.pdf>

³⁷ Vinayak Sharma, "Why Indian Steel Producers are Opposing RCEP." Diakses pada 03 Oktober 2020, <https://www.entrepreneur.com/article/340372>

³⁸ "Indian Dairy Product Market," Indian Council of Food and Agriculture. https://www.icfa.org.in/assets/doc/reports/Indian_Dairy_Product_Market.pdf

pada tahun 2016 menjadi 810,9 juta ton pada tahun 2017.³⁹ Kemampuan India yang dapat memproduksi skala besar, menjadikan 40% masyarakat pedesaan India mengkonsumsi produknya sendiri. Kemampuan India dalam menghasilkan susu dan produk olahan susu dalam jumlah yang besar, pasar India dalam sektor ini dinilai sangat mandiri dan proteksionis.⁴⁰

Beberapa dari mitra perdagangan India adalah Selandia Baru dan Australia. Selandia Baru dikenal sebagai negara produsen olahan susu pada posisi ke-8 di dunia. Selain itu, Selandia Baru juga merupakan negara eksportir produk olahan susu yang mengirim 95% setiap tahunnya atau setara dengan seperlima dari jumlah global yaitu US\$ 5,4 miliar pada tahun 2018.⁴¹ Hingga pada bulan Juni 2018, ekspor produk olahan susu Selandia Baru bernilai sekitar US\$ 11,87 miliar. Lima produk ekspor susu teratas adalah: susu bubuk utuh, mentega, keju, susu formula bayi, dan susu bubuk. China, Australia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jepang adalah pasar bagi Selandia Baru

dalam mengekspor produk olahan susu.⁴²

Sedangkan di Australia, produk susu adalah salah satu industri pedesaan terpenting di Australia yang memproduksi sekitar 8,8 miliar liter susu pada tahun 2018-2019 dan mempekerjakan langsung sekitar 46.200 orang. Sektor ini adalah industri pedesaan terbesar keempat di Australia yang menghasilkan \$ 4,4 miliar dalam nilai pertanian pada tahun 2018-2019. Mayoritas produksi susu terjadi di pesisir tenggara di Victoria, New South Wales, dan Tasmania. Australia mengekspor sekitar 35% dari produksi susunya, dengan nilai ekspor \$ 3,2 miliar pada 2018-2019. Sebagian besar ekspor dalam bentuk produk bernilai tambah seperti keju, mentega, dan susu bubuk.⁴³

Selandia Baru dan Australia merupakan negara anggota RCEP dan sempat mendorong India agar membuka sektor olahan susu tetapi bagi India, hal ini akan mengakibatkan diberlakukannya dumping dari negara yang memiliki surplus olahan susu.⁴⁴ Kemampuan Selandia Baru dan Australia yang bisa mengekspor dalam jumlah besar juga akan mengakibatkan India

³⁹ "Annual Report 2018-2019," Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.

<http://dairf.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report.pdf>

⁴⁰ John Sarkar, "Why Indian dairy giants fear disruption from New Zealand companies." Diakses pada 03 Oktober 2020, <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/why-indian-dairy-giants-fear-disruption-from-new-zealand-cos/articleshow/71884131.cms>

⁴¹ Sanjeeb Mukherjee, "NDDDB, Amul oppose dairy import talks with New Zealand and Australia." Diakses pada 04 Oktober 2020 https://www.business-standard.com/article/companies/nddb-amul-oppose-dairy-import-talks-with-new-zealand-and-australia-119091800034_1.html

⁴² "About the NZ Dairy Industry," Dairy Companies of New Zealand. Diakses pada 04 Oktober 2020,

<https://www.dcanz.com/about-the-nz-dairy-industry/>

⁴³ "Dairy in Australia," Department of Agriculture, Water, and the Environment. Diakses pada 04 Oktober 2020,

<https://www.agriculture.gov.au/ag-farm-food/meat-wool-dairy/dairy>

⁴⁴ ET Bureau, "New Zealand trade ministry allays India's dairy import fears." Diakses pada 20 Oktober 2020, <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/new-zealand-trade-ministry-allays-indias-dairy-import-fears/articleshow/74368893.cms?from=mdr>

dibanjiri oleh impor olahan susu padahal India termasuk negara yang mandiri dalam sektor tersebut yang ditandai dengan sebagian besar produknya digunakan oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini juga akan mengakibatkan perusahaan dalam negeri menurunkan harga penjualannya. Jika India memberikan izin impor pada sektor ini, perusahaan di India harus memotong harga hingga setengahnya. Perusahaan akan memaksa untuk menurunkan harga pengadaan. Pengadaan seperti ini dinilai akan membuat peternakan tidak dapat dijalankan di India.⁴⁵

Adanya Resistensi dari Partai Politik Modi

Keputusan India memilih untuk mengundurkan diri dari kerja sama ini juga dipengaruhi oleh BJP yang merupakan asal partai Modi. Modi percaya bahwa mengikuti RCEP tidak sesuai dengan prospek politik BJP yang masih berlangsung. Sekutu partai BJP dan oposisi Partai Kongres juga memiliki kekhawatiran mengenai India terlibat dalam RCEP, terutama oleh sayap kanan BJP yaitu Sangh Parivar.⁴⁶ Penolakan penandatanganan RCEP datang dari Swadeshi Jagran Manch dan Vharatiya Kisan Sangh, dua afiliasi RSS, induk ideologi BJP. SJM

mengeluarkan catatan pers yang mengatakan keputusan itu akan membatalkan berbagai pekerjaan baik yang dilakukan oleh pemerintah NDA di bawah PM Modi dalam enam bulan terakhir. Perjanjian tersebut akan membunuh Make In India, Digital India, Skill India dan berbagai cara lain untuk penciptaan lapangan kerja. Setelah keluar dari negosiasi RCEP; kami meminta pemerintah untuk meninjau Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang salah dan CEPA yang dilakukan dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara lain.⁴⁷

Swadeshi Jagran Manch yang sering dikenal sebagai sayap ekonomi organisasi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), mengadakan protes nasional selama 11 hari terhadap RCEP selama Oktober 2019. Mereka mengklaim bahwa kesepakatan kerja sama tersebut akan mengintensifkan krisis yang masih berlangsung dalam sektor manufaktur dan pertanian India. Dalam pidato tahunannya, Kepala RSS Mohan Bhagwat mendesak pemerintah India untuk tidak 'mengalah terlalu banyak' dalam negosiasi perdagangan. RSS berusaha memojokkan pemerintah di sepanjang garis ekonomi pada saat kinerja BJP jauh di bawah ekspektasi dalam pemilihan majelis di negara bagian Maharashtra dan Haryana.⁴⁸

⁴⁵ Dilip Kumar, "Industry miffed as govt mulls dairy import from New Zealand and Australia." Diakses pada 04 Oktober 2020, https://www.business-standard.com/article/economy-policy/industry-miffed-as-govt-mulls-dairy-import-from-new-zealand-australia-119072000739_1.html

⁴⁶ Raj Verma, "The Regional Comprehensive Economic Partnership and India: A Test Case of Narendra Modi's Statemanship," *Australian Journal Of International Affairs* 2020, VOL. 74, NO. 5 (:479) 479–485

⁴⁷ Anuja, Elizabeth Roche, "The Politics behind India's no to RCEP deal." Diakses pada 10 November 2020 <https://www.livemint.com/politics/policy/the-politics-behind-india-s-no-to-rcep-deal-11572936377571.html>

⁴⁸ Choudhury, Rahul Nath "Why did India betray RCEP?" Diakses pada 10 November 2020 <https://www.eastasiaforum.org/2019/12/21/why-did-india-betray-rcep/>

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis teliti, maka penulis menarik beberapa kesimpulan. Setelah 7 tahun India terlibat dalam negosiasi RCEP, India memilih untuk mengundurkan diri kerja sama ini oleh perdana menteri saat ini yaitu Narendra Modi. Berdasarkan teori dan konsep yang digunakan penulis yaitu modinomics/populisme Modi dan kepentingan nasional, Modi mengundurkan diri dari kerja sama RCEP didasari oleh kepentingan nasional India yang mengutamakan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Keputusan Modi mengundurkan diri dari RCEP mewakili suara rakyat dari beberapa kelompok yang protes dan menganggap adanya kerja sama ini akan dapat merugikan India. Berdasarkan perspektif nasionalisme ekonomi yang digunakan, India di bawah pemerintahan Modi, masih menerapkan sistem proteksionis. Modi sendiri selama masa kampanye dan pemerintahannya lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Modi menganggap apabila India mengikut RCEP akan dapat terancam di beberapa sektor yaitu sektor pertanian dan manufaktur, terutama kekhawatiran India akan adanya lonjakan barang impor murah dari China, baja impor, dan produk olahan susu dari Australia dan Selandia Baru. Sektor yang India khawatirkan ini merupakan sektor penting. Selain karena adanya kekhawatiran, adanya penolakan dari partai politik Modi yaitu BJP juga mendasari keputusan Modi. Hal ini dikarenakan prinsip RCEP tidak sesuai dengan jalan ekonomi politik BJP. Tingkat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah negara bangsa yang mempercayai

bahwa negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti. Keikutsertaan India dalam RCEP oleh Singh pada awalnya didasari oleh kebijakan luar negeri *Look East/Act East* yang fokusnya kerja sama pada Asia-Pasifik namun setelah Modi menjabat sebagai perdana menteri kebijakan luar negeri ini menjadi terhambat karena pada masa pemerintah Modi, India memiliki kebijakan ekonomi dalam negeri yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- “Annual Report 2018-2019,”
Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries.
<http://dadf.gov.in/sites/default/files/Annual%20Report.pdf>
- “Dairy in Australia,” Department of Agriculture, Water, and the Environment. Diakses pada 04 Oktober 2020,
<https://www.agriculture.gov.au/ag-farm-food/meat-wool-dairy/dairy>
- “Indian Dairy Product Market,”
Indian Council of Food and Agriculture.
https://www.icfa.org.in/assets/doc/reports/Indian_Dairy_Product_Market.pdf
- “Iron and Steel Industry in India,”
India Brand Equity Foundation (IBEF), diakses pada 23 September 2020,
[https://www.ibef.org/industry/steel.aspx#:~:text=Indian%20Steel%20Industry%20Report%20\(Size,KB%20\)%20\(July%2C%202020\)&text=India%20was%20the%20world's%20second,ore%20and%20cost%2Deffective%20labour.](https://www.ibef.org/industry/steel.aspx#:~:text=Indian%20Steel%20Industry%20Report%20(Size,KB%20)%20(July%2C%202020)&text=India%20was%20the%20world's%20second,ore%20and%20cost%2Deffective%20labour.)

- “RCEP Joint Leaders Statement for 3rd RCEP Summit,” ASEAN (2019), diakses pada 22 Desember 2019, <https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-Summit.pdf>
- “RCEP Joint Leaders Statement for 3rd RCEP Summit,” ASEAN (2019), diakses pada 22 Desember 2019, <https://asean.org/storage/2019/11/FINAL-RCEP-Joint-Leaders-Statement-for-3rd-RCEP-Summit.pdf>
- “Steel Export Report: India,” Global Steel Trade Monitor, diakses pada 02 Oktober 2020, <https://legacy.trade.gov/steel/countries/pdfs/exports-India.pdf>
- Abduraxmonovich, Abdurahim Okhunov. “Economic Cooperation between India and Central Asian Republics with Special Reference to Uzbekistan.” *RIS Discussion Papers*, No. 53 (June 2003), 1-27.
- Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority of India, “Dairy Products.” Diakses pada 21 Juni 2020, http://apeda.gov.in/apedawebsite/SubHead_Products/Dairy_Products.htm
- Amiti Sen, “India Not Ready to Take Up RCEP’s ‘Flexible’ Offer.” Diakses pada 22 Oktober 2020, <https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/india-not-ready-to-take-up-rceps-flexible-offer/article31797002.ece>
- Anuja, Elizabeth Roche, “The Politics behind India’s no to RCEP deal.” Diakses pada 10 November 2020 <https://www.livemint.com/politics/policy/the-politics-behind-india-s-no-to-rcep-deal-11572936377571.html>
- Arulanantham, David P “The paradox of the BJP’s stance towards external economic liberalisation: why a Hindu nationalist party furthered globalisation in India,” *Asia Programme Royal Institute of International Affairs*, (2014): 1-15
- ASEAN Framework for RCEP
- ASEAN, “Regional Comprehensive Economic Partnership,” diakses pada 28 Juni 2020, https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership
- ASEAN. “Joint Leaders’ Statement on The Regional Comprehensive Economic Partnership.” Diakses pada 16 November 2020, <https://asean.org/joint-leaders-statement-regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-2/>
- Basrur, Rajesh. “Modi’s Foreign Policy Fundamentals: A Trajectory Unchanged,” *International Affairs* Vol. 93 No. 1 (2017): 1-20.
- Bernama, “35th ASEAN Summit Begins,” diakses pada 03 Januari 2020, <https://www.nst.com.my/news/nation/2019/11/535373/35th-asean-summit-begins>.
- Bilaterals.org, “India and Regional Comprehensive Economic Partnership: Key Issues and Implications,” diakses pada 28 Juni 2020, <https://www.bilaterals.org/?india-and-regional-comprehensive>

- Chandra, Vikash. "Modi Government and Changing Patterns in Indian Foreign Policy," *Jadavpur Journal of International Relations* Vol. 21 No. 2 (2017): 98-117.
- Choudhury, Rahul Nath "Why did India betray RCEP?" Diakses pada 10 November 2020 <https://www.eastasiaforum.org/2019/12/21/why-did-india-betray-rcep/>
- Dairy Companies of New Zealand. "About the NZ Dairy Industry," Diakses pada 04 Oktober 2020, <https://www.dcanz.com/about-the-nz-dairy-industry/>
- Das, Sanchita Basu and Reema B. Jagtiani "The Regional Comprehensive Economic Partnership: New Paradigm or Old Wine in a New Bottle." ISEAS Economic Working Paper No. 2014-3 (November 2014): 1-41
- Dewan Perwakilan Rakyat RI, "Kerja Sama Perdagangan Barang pada Forum RCEP bagi Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI*. Vol. 09 No.1 (Juni 2019): 67-81.
- Dilip Kumar, "Industry miffed as govt mulls dairy import from New Zealand and Australia." Diakses pada 04 Oktober 2020, https://www.business-standard.com/article/economy-policy/industry-miffed-as-govt-mulls-dairy-import-from-new-zealand-australia-119072000739_1.html
- ET Bureau, "New Zealand trade ministry allays India's dairy import fears." Diakses pada 20 Oktober 2020, <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/new-zealand-trade-ministry-allays-indias-dairy-import-fears/articleshow/74368893.cms?from=mdr>
- Hall, Ian. "Multialignment and Indian Foreign Policy under Narendra Modi." *The Commonwealth Journal of International Affairs* Vol. 105 No.3 (2016): 271-286
- Hemant Singh "What is the Sector-wise contribution of GDP in India?" Diakses pada 05 Juni 2020 <https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-is-the-sectorwise-contribution-in-gdp-of-india-1519797705-1>
- India Brand Equity Foundation, "Iron and Steel Industry in India." Diakses pada 21 Juni 2020 <https://www.ibef.org/industry/steel.aspx>
- Jha, R. "Modinomics, Design, Implementation, and Prospects", *Asian Economic Policy Review* (2018): 1-18
- John Sarkar, "Why Indian dairy giants fear disruption from New Zealand companies." Diakses pada 03 Oktober 2020, <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/why-indian-dairy-giants-fear-disruption-from-new-zealand-cos/articleshow/71884131.cms>
- Manash Buyan, "India will not join RCEP trade , my conscience won't allow it, says PM Modi." Diakses pada 03 September 2020, <https://theprint.in/diplomacy/india-will-not-join-rcep-deal-my-conscience-wont-allow-says-pm-modi/315636/>
- Nayar, Baldev Raj. "Limit of Economic Nationalism in India,"

- Asian Survey* Vol. 40 No. 5 (September 2000): 792-815
- Parliament of India (Report), Impact of Chinese Goods on Indian Industry. (Rajya Sabha Secretariat: New Delhi, 2018). Diakses pada 23 September 2020, http://164.100.47.5/committee_web/ReportFile/13/97/145_2018_7_13.pdf
- Ragimun. "Kerja Sama Perdagangan Barang pada Forum RCEP bagi Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 09 No. 1 (Juni 2018): 67-81
- Rahul Mishra, "Why India Pulled Out of RCEP Free Trade Deal," diakses pada 03 September 2020, <https://www.dw.com/en/why-india-pulled-out-of-the-rcep-free-trade-deal/a-51137128>.
- Sanchita Basu Das, "Asia's Regional Comprehensive Economic Partnership," diakses pada 14 Agustus 2020, <https://www.eastasiaforum.org/2012/08/27/asias-regional-comprehensive-economic-partnership/>
- Sanjeeb Mukherjee, "NDDB, Amul oppose dairy import talks with New Zealand and Australia." Diakses pada 04 Oktober 2020 https://www.business-standard.com/article/companies/nddb-amul-oppose-dairy-import-talks-with-new-zealand-and-australia-119091800034_1.html
- Sharma, Shalendra D. "Modinomics in India The Promise and the Reality," *Asian Survey*, Vol. 59, No. 3 (2019): 548-572
- Swaminathan S. Anklesaria Aiyar, "India's New Protectionism Threatens Gains from Economic Reform," diakses pada 28 Agustus 2020 <https://www.cato.org/publications/policy-analysis/indias-new-protectionism-threatens-gains-economic-reform>
- Transcript of Media Briefing by Secretary (East) during PM's visit to Thailand (November 04, 2019)
- Verma, Raj. "The Regional Comprehensive Economic Partnership and India: A Test Case of Narendra Mod's Statemanship," *Australian Journal Of International Affairs* Vol. 74, No. 5 (2020): 479-485
- Vinayak Sharma, "Why Indian Steel Producers are Opposing RCEP." Diakses pada 03 Oktober 2020, <https://www.entrepreneur.com/article/340372>
- World Steel Association, "Global crude steel output increases by 3.4% in 2019." Diakses pada 29 Desember 2020, <https://www.worldsteel.org/mediacentre/press-releases/2020/Global-crude-steel-output-increases-by-3.4-in-2019.html>